

ADAKAH TEOLOGI MORAL YANG PANDAI BERTANYA?

BERNHARD KIESER, SJ

Apakah teologi moral harus lintas ilmu? Mengenai pertanyaan itu tidak usah menulis karangan, karena teologi moral sudah lama lintas ilmu. Masalahnya: *manakah tantangan dan pertanyaan* teologi moral yang kini harus dijawab oleh rekan-rekan ilmu, supaya teologi moral dapat menjadi sumbangan bagi Gereja yang hidup? Habis, teologi hanya dapat hidup – kata Veritatis splendor – kalau berpartisipasi, artinya terlibat dan membaktikan diri pada Gereja sebagai komunitas beriman. Dan masalahnya lagi: ilmu manakah yang harus diajak dan ditantang oleh teologi moral, supaya ikut serta dalam mencari jawaban untuk pertanyaan itu?

Sebab berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan moral, nampaknya tidak lagi cukup kalau teologi hanya begitu saja menerima sumbangan ilmu-ilmu kelakuan manusia; seakan-akan ilmu sosial dan psikologi menyediakan bahan supaya teologi moral dapat berpikir lebih lanjut. Pesan Veritatis splendor yang begitu menekankan kewajiban gerejawi para teolog moral, meninggalkan tugas, tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana harus dijalankan. Katanya: "The moral theologian must therefore exercise careful discernment in the context of today's prevalently scientific and technical culture, exposed as it is to the dangers of relativism, pragmatism and positivism. While not denying the validity of such (empirical) methods, but at the same time not restricting its viewpoint to them, moral theology, faithful to the supernatural sense of the faith, takes into account first and foremost the spiritual dimension of the human heart and its vocation to divine love."¹

Karena membahas tindakan manusia merdeka sebagai usaha komunikatif demi kepentingan bersama, teologi moral mesti menghormati dan memperhatikan misteri hati manusia yang tidak pernah sepenuhnya

nya terjangkau, dan pada saat yang sama teologi moral mesti mengusahakan kesungguhan penalaran yang dapat diakui umum. Terus-menerus teologi moral mesti menghadapi tantangan untuk tidak mengkhianati misteri hati manusia (dan misteri rahmat Allah!) serta tantangan untuk tidak mengurbankan kejujuran manusia pada kecenderungan religius untuk memutlakkan pendapatnya sendiri dengan otoritas Allah. Bagi teologi moral, masalah metode penalaran lintas ilmu termasuk inti – dan tidak pernah selesai. Dan oleh sebab itu, memang jauh lebih menarik untuk bertanya:

- **manakah pertanyaan hidup yang mengundang diskusi moral lintas ilmu – sekarang ini dalam Gereja kita Indonesia?**
- **manakah ilmu dan tokoh-tokoh yang mesti kita undang untuk ikut bicara?**

Dalam karangan ini kami menguraikan suatu agenda untuk suatu penelitian dan wacana lebih lanjut, berpangkal pada suatu agenda, yang pada tahun 1996 – kurang-lebih resmi – dirumuskan, diperdebatkan, dan ditetapkan oleh Gereja Katolik di Indonesia bagaikan "*Pedoman Gereja Katolik Indonesia*". "Pedoman" diumumkan dengan wibawa para uskup, namun disusun dan dirumuskan melalui proses konsultasi yang luas dan panjang, sehingga "disebut Pedoman Umat, baik dalam arti Pedoman yang disusun oleh umat maupun dalam arti Pedoman bagi umat" (Pengantar). Satu setengah tahun yang lalu, ini memperlihatkan bahwa Pedoman bagi umat itu juga dipakai oleh umat. Bagian pertama, yakni "**Arah Dasar**", dimaksudkan dan dipakai sebagai pengarahannya bagi hidup komunitas beriman; sementara bagian kedua (dengan judul "*Umat Katolik melibatkan diri dalam upaya menyejahterakan seluruh rakyat*") menyebut usul-usul penjabaran yang hendaknya dipertimbangkan dan diterapkan menurut kepentingan dan kesempatan. Diharapkan "semoga kita semua, seluruh umat Katolik Indonesia dapat semakin menghayati iman dan mengamalkannya di tengah saudara-saudara sebangsa". *Pedoman* menjadi pengarahannya bagi Gereja yang hidup supaya komunitas beriman menghayati imannya dalam komunitas bangsa; dan biarpun "Arah Dasar berisi prinsip iman yang paling dasariah, No. 1-16 menunjukkan prinsip terdalam, sedangkan No. 17-26 memberikan pokok-pokok pastoral", seluruh pedoman mengenai praksis komunikatif umat beriman. Pedoman mengarahkan praksis hidup Gereja sebagai komunitas moral. Dapatkah teologi moral menyumbang pada penghayatan iman umat dalam praksis komunikatif? Jawabannya mesti praktis; oleh sebab itu kini kita pertanyakan:

Manakah – menurut Pedoman Gereja Katolik Indonesia – pertanyaan-pertanyaan praksis komunikatif, yang harus dibicarakan dalam umat beriman kristiani di Indonesia?

(1) Manakah ciri pokok dari Gereja Indonesia sebagaimana digariskan dalam Pedoman itu? (2) Manakah peluang-peluang komunikatif bagi Gereja Indonesia? (3) Manakah tema-tema komunikasi yang mendesak?

Umat Musafir – Peguyuban Diutus

1. Pertama-tama mengenai beberapa ciri dasar Gereja. Kata Arah Dasar: "Kita, umat Katolik Indonesia, yakin bahwa kita diutus oleh Tuhan **menjadi musafir-hidup bersama** seluruh bangsa Indonesia" (Arah Dasar, 1). Dua kali dikatakan bahwa umat Katolik berada "dalam perjalanan sebagai musafir" (Arah Dasar, 9), kiranya untuk menegaskan: tidak ada umat gerejawi selain dalam kesatuan hidup dengan semua orang yang berjuang membangun hidup bersama. "Dalam kesatuan dengan peziarahan hidup seluruh insan beriman tersebut, kita menghayati pasang surut dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai dialog hidup" (Arah Dasar, 10). Umat mulai beriman kalau bersama dengan semua orang menghadapi dan menggumuli permasalahan hidup. Dalam peziarahan itu, umat sama-sama mengalami betapa kuat dan betapa fana serta sementara dinamika hidup itu; dalam peziarahan itu, umat "didukung oleh kepercayaan bahwa Roh Allah senantiasa mendampingi dan menguatkan umat-Nya" (Arah Dasar, 29); umat menemukan peziarahan karena mengimani Tuhan yang "menyertai kita sampai akhir zaman", yakin "bahwa pada akhir zaman, Bapa akan menemukan Putra dengan siapa pun yang setia sampai akhir". (Arah Dasar, 28) Dalam perantauannya, umat manusia yang menjadi musafir dalam iman, punya tujuan jelas; dan umat musafir menjadi Gereja yang hidup, kalau menegaskan arah. Mungkin dapat dikatakan: Pedoman ingin memandang Gereja bukan sebagai lembaga tersendiri, bahkan bukan sebagai peguyuban tersendiri di samping kelompok-kelompok lain; Gereja hendaknya menjadi bagaikan peristiwa pengharapan yang menegaskan arah dalam peziarahan kita semua.

Spiritualitas umat Allah dari Perjanjian Lama (dan sebagian Perjanjian Baru) serta (sebagian) eklesiologi Konsili Vatikan II bergema dalam pandangan Pedoman mengenai Gereja sebagai umat Allah yang musafir. Namun jelas, bahwa pandangan Pedoman harus diartikan menurut diskusi dalam Sidang Paripurna Kelima dari FABC di Bandung

yang pada tahun 1990 membahas "Tantangan-tantangan bagi Gereja di Asia dasawarsa 1990" dan yang menuangkan hasil pembicaraan dalam pernyataan penutupan dengan judul "Perjalanan Bersama menuju ke Millenium Ketiga".² Menurut pernyataan itu, perjalanan umat digairahkan oleh dinamika perubahan yang serba ambivalen itu; sebab di mana lagi kalau bukan dalam dinamika perubahan, dinamika Gereja mendapat wujudnya! Perjalanan umat dihadang oleh kekerasan dan ditantang oleh ketidakadilan yang meluas; mana orang dapat tinggal diam, kalau melihat (apalagi merasakan!) penindasan seperti itu. Penderitaan membuat tersangkut, terlibat, dan tergerak. Perjalanan umat disuluh oleh pengharapan, yang menampilkan diri dalam pelbagai tanda. "Inilah saat krisis di benua Asia, suatu saat historis, yang membuka jalan menuju bahaya atau menuju kemajuan. Saat sejarah yang satu dan sama ini menawarkan peluang untuk dosa dan juga peluang untuk rahmat. Maka adalah tugas dari Gereja-gereja setempat di Asia, supaya mereka menempuh jalan bersama bangsa mereka dan mendampingi bangsa mereka dalam peziarahan menuju suatu dunia yang lebih dipenuhi dengan Roh. Sebab dalam keresahan yang menggelembung dan meragi itu, kita merasakan binaan Roh pencipta, yang sering membingungkan, namun selalu mengejutkan, menantang dan membangkitkan pengharapan."³ Bicara mengenai "*umat musafir*" berarti bicara mengenai *tugas umat dalam proses kemasyarakatan*: semua orang tersangkut dalam proses perubahan, dan umat hendaknya memberi kesaksian akan pengharapan yang ada pada kita. Arah Dasar dari Pedoman Gereja Katolik Indonesia menafsirkan tugas umat musafir itu dengan pelbagai arti.

2. Paling mencolok dalam Arah Dasar, bahwa umat musafir "*diutus ke seluruh dunia*" dan oleh sebab itu diharapkan bahwa semua orang Katolik dalam semua peguyuban teritorial dan kategorial "menghayati serta mengamalkan imannya sesuai dengan daerah dan pola kegiatan" mereka (Arah Dasar, 4 dan 3). "Tuhan mengutus kita sebagai saksi datangnya cinta Allah tanpa batas" (Arah Dasar, 9) dan "sebagai kawan kecil di antara umat yang beragama Islam, Hindu Buddha, Kristen Protestan, dan penganut agama-agama asli, umat Katolik dipanggil untuk membangun koinonia yang mengalirkan diakonia" (Arah Dasar, 10). Hidup umat musafir dijelaskan sebagai perutusan, supaya "kawan kecil" menghalau kecemasan karena ingat: kita menjadi anggota dalam gerakan yang bersejarah (*bdk.* Arah Dasar, 4) dan perutusan mengikat kita untuk "menanggapi Karya Penyelamatan Allah" dan

"mauewartakan Kabar Baik penyelamatan-Nya kepada sesama rakyat dalam segala segi dan lapisan hidup manusia serta seluruh bangsa" (Arah Dasar, 6). Hidup umat musafir dijelaskan sebagai perutusan, supaya "kawanan kecil" mewujudkan peguyubannya "menjadi persekutuan (koinonia) tanda dan sarana kehadiran Kerajaan Allah ... di tempat tinggal serta di lingkungan pengabdian masing-masing" (Arah Dasar, 7).

Dalam perhatian besar untuk **perutusan** umat musafir, diangkat pesan Paus Paulus VI, yang terungkap dalam ensiklik "Ecclesiam suam" dan dalam surat apostolik "Evangelii nuntiandi": pusat hidup dari Gereja dan umat adalah Kristus dan gerakan-Nya, untukewartkan injil. Bergemalah juga keprihatinan Paus Joannes Paulus II, agar orang kristiani di tengah-tengah begitu banyak orang dengan keyakinan lain tetap misioner, membaktikan hidup mereka demi evangelisasi baru. Namun perhatian untuk perutusan umat musafir dalam Arah Dasar itu mesti diartikan terutama dalam rangka keprihatinan FABC supaya umat kristiani dapat membarui dalam dirinya "the sense of mission".⁴ Pengutusan mengikat, terutama pada Kristus Tuhan dan pada usaha agar keselamatan Allah sampai pada seluruh dunia. Pengutusan menjadi motivasi, karena injil adalah ragi pembebasan dan pembaruan masyarakat manusia. "Masyarakat Asia membutuhkan dan menantikan nilai-nilai Kerajaan Allah." Singkatnya: Supaya umat yang sempat mengalami keselamatan (damai, diterima, mantap) dalam agama kristiani, menjadi bergerak, menjadi misioner. "Kita menantikan saat, bila putra-putri Gereja menerima perutusan untuk injil bukan hanya sebagai tugas yang harus mereka jalankan, melainkan sebagai kebanggaan yang dapat mereka syukuri dan sebagai hak yang mereka pertahankan dengan saksama. Dibina dalam spiritualitas misioner, orang kristiani menjadi saksi gembira ... bagi Kristus yang mereka ikuti."⁵

Pengutusan harus membuat kelompok menjadi "inklusif"; sebab dengan pengutusan, **kepentingan kelompok** diletakkan **di luar lingkungan kelompok** sendiri. Kepentingan kelompok bukan lagi supaya bertahan terus; adalah kepentingan para utusan, supaya terus-menerus terbentuk suatu peguyuban lain dan baru, yang terus-menerus melibatkan orang-orang baru; adalah kepentingan orang kristiani supaya semua orang (terutama yang belum menjadi kristiani) menjadi bersatu dalam kasih Allah yang diawali dalam Kristus. Peguyuban kristiani berhasil, kalau terbentuk peguyuban semua anak Allah. "We shall be for ourselves what we shall be for others." Menurut Sidang FABC di Bandung: "Kita memang suatu minoritas (di Asia), namun hal itu seharusnya tidak

menghalangi kita untuk bekerja sama dengan orang kristiani dari Gereja-gereja lain dan dengan orang-orang dari agama-agama lain, dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk pembebasan bangsa kita dari dosa dan wujud-wujudnya yang sosial ... Tuhan meneguhkan: Janganlah takut, kawanan kecil, sebab Bapa berkenan memberikan Kerajaan kepadamu."⁶

3. Kelompok minoritas dalam masyarakat dapat menawarkan gaya hidup bersama yang lain daripada yang lain, sebagai alternatif untuk masyarakat besar. Asal terbuka; dan dalam Arah Dasar, **keterbukaan umat musafir** mempunyai arti ganda. Pertama: umat terbuka, kalau sanggup menerima kewajiban sosial dan memikul tanggung jawab dalam masyarakat (politik): "membangun persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia dari segala lapisan dan golongan, seraya mengupayakan kesejahteraan yang lebih baik" (Arah Dasar, 9). Maka Gereja Indonesia hendaknya "menghayati" diri "sebagai bagian integral rakyat Indonesia", sehingga "mau mencurahkan segenap tenaga guna menyingkirkan segala hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia" (Arah Dasar, 11). Namun terbuka berarti juga bahwa iman akan Allah membentangkan cakrawala luas, di mana segala usaha dan masalah mendapat tempat (*bdk.* Arah Dasar, 12), di mana setiap orang kita kenal sebagai anak Allah dan saudara kita (*bdk.* Arah Dasar, 10) dan di mana semua usaha manusia menjadi bagian dari karya Allah yang akan menebus dan menyempurnakan semuanya (*bdk.* Arah Dasar, 28).

Keterbukaan ternyata lebih dari hanya tidak tertutup; diharapkan agar di semua kawasan dunia umat musafir benar-benar menjadi *satu-hidup* dalam "companionship" (kesetiakawanan) dengan bangsa mereka dalam pergulatan sosial, dan menjadi sehati-sejiwa dalam "compassion" (bela rasa) terutama dengan semua orang yang menderita.⁷ Hidup umat – bukan usahanya dan perbuatannya! – menjadi sumbangannya. Hidup itu tampil tidak lain daripada hidup orang kebanyakan dalam lingkungan kita. Maka umat musafir itu sebenarnya juga tidak dapat membanggakan sumbangan jasa yang istimewa atau sumbangan moral yang lebih baik: dalam pergumulan yang sama, tinggal umat mempertahankan pengharapan (keterbukaan!!), bahwa dalam pergulatan manusia berkaryalah kuasa Allah.⁸ Keterbukaan pada Allah, yang dengan kuasa-Nya berkarya dalam kelemahan kita, memberikan arti pada tugas umat yang musafir.

4. * Dialog hidup adalah kata kunci keempat yang dalam Arah Dasar menggambarkan ciri Gereja Indonesia; **dialog hidup** nampaknya tidak lain daripada keterbukaan. "Kita menghayati pasang surut dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai dialog hidup" (Arah Dasar, 10); selanjutnya dialog hidup itu – menurut Arah Dasar – terwujud dalam dukungan terhadap pembangunan negara demokratis dan berperikemanusiaan. Hanya sebagai tambahan, dalam penjabaran Arah Dasar masih dikatakan, bahwa dengan sikap dialogis orang juga "berse-dia saling belajar dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama."⁹ Ber-sama dengan FABC (komisi penasihat teologi dari FABC, mengembangk-an suatu visi mengenai dialog antara agama!)"¹⁰, Arah Dasar menekankan bahwa dialog hanya dapat berlangsung kalau orang terlibat dalam perjuangan untuk pembebasan; selain itu, pertimbangan FABC meng-ingatkan bahwa dengan dialog kita menempuh suatu **proses belajar** (satu sama lain), yakni suatu proses pertumbuhan, dan para partner dialog, perorangan dan kelompok saling melengkapi.¹¹ Maka usaha untuk memikul tanggung jawab kemasyarakatan berarti bagi umat musafir: **bertumbuh**. Yakni bertumbuh karena belajar dalam dialog dan dengan demikian menuju Kerajaan Allah, sebab Allah memanggil semua orang dan semua bangsa ke dalam Kerajaan-Nya.¹²

Keempat ciri melukiskan gambaran Gereja Indonesia sebagai **peguyuban interpretasi dan transformasi**. Inti hidup Gereja tidak perlu kita cari dalam suatu kekhususan yang membedakan kelompok beriman kristiani dari semua kelompok dan lembaga lainnya. Sebaliknya, Arah Dasar menekankan bahwa Gereja menjadi peguyuban orang beriman, kalau bersatu hidup dan memadukan usaha dalam kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab keselamatan diimani sebagai sejarah yang dialami Allah bersama dengan umat manusia; dan di ka-wasan Asia, kawanan kecil tersangkut dan menjadi terlibat dalam per-gumulan masyarakat, sambil bertanya: apa yang dapat kita buat, kalau kini Allah mulai bertindak? Untuk mendapatkan **inti iman**, kelompok orang beriman **meninggalkan kepentingannya sendiri** dan menjum-pai Allah, bukan dengan transendensi ke atas melainkan dengan melibatkan diri dalam sejarah. Menurut Arah Dasar, kelompok orang beriman mendapat kepastian mengenai panggilannya bukan dengan memegang pada ajaran (atau bahkan dogma) Gereja sebagai anggaran dasar; bahkan bukan pertama-tama dengan mendasarkan diri pada Kitab Suci. Umat musafir sadar bahwa terpenggil kalau (ikut) memba-ngun peguyuban semua orang (konkretnya: basic human communi-ties???), tanpa paksaan dan tanpa mengecualikan siapa pun. "Maklumat

Kerajaan Allah” memang dipercayakan kepada umat musafir itu; namun Kerajaan Allah hanya mungkin dimaklumkan, dengan mengundang orang, supaya menangkap sapaan Allah dalam kemerdekaan hatinya sendiri, dan supaya ia – gantinya – rela melibatkan iman hatinya demi membangun keluarga Allah dan persaudaraan semua manusia. Arah Dasar menggambarkan Gereja sebagai **peguyuban politik**, yang menjalankan tanggung jawab sosial dalam pembangunan masyarakat, dan sebagai **peguyuban eskatologik**, yang tidak mendasarkan perjuangannya pada kepentingan (*kongkalikong*) kongsi kristiani, melainkan pada pengharapan bahwa orang dapat membangun masyarakat, di mana tak seorang pun disingkirkan. Habis, hidup Allah dimaksudkan untuk semua!

Arah Dasar mengingatkan: Gereja ternyata hidup, kalau melibatkan diri pada proses kemasyarakatan, yakni pada proses seluas dunia untuk membangun keadilan. Dan semua mesti terlibat secara kritis: jangan sampai dibangun kebersamaan demi kepentingan entah siapa, atau demi keamanan, demi kesatuan bangsa, demi keharmonisan atau demi tujuan mana pun. Kebersamaan dibangun untuk sesama manusia. Oleh sebab itu, usaha kebersamaan kita melawan usaha-usaha untuk membuat pikiran orang seragam, untuk menampung kerinduan dan tekad orang menjadi selaras (selaras dengan entah siapa?), untuk menyalurkan aspirasi orang demi tujuan yang syah (syah untuk apa?). Kebersamaan manusiawi diperkaya dengan kisah hidup masing-masing anggotanya.

Arah Dasar memperkenalkan Gereja Indonesia sebagai kelompok interpretasi dan transformatif dalam masyarakat kita. Dalam pusat hidup Gereja ditempatkan usaha moral transformatif. Apakah program dan inti hidup umat musafir benar-benar terlaksana?

Moral Musafir – Moral Komunikatif

Sebab program eklesiologis tampil dengan jelas, namun kalau dibaca menurut tata cara moral, program Arah Dasar tampil ambivalen. Umpamanya: Arah Dasar tidak ragu-ragu ”bahwa proses bertaqwa bersama itu terlaksana dalam lingkup dan proses membudaya di tengah lingkungan masyarakat, bangsa dan negara” (Arah Dasar, 8), sehingga kesaksian kristiani berarti ”membangun persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia dari segala lapisan ...” (Arah Dasar, 9). Namun kalau dilihat dengan cermat, kesatuan ternyata sudah dibangun, tinggal kita ”mencurahkan segenap tenaga guna menyingkirkan segala hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia” (Arah Dasar, 11), yang – syukur pada Tuhan Mahaesa – di-”jamin” (bersama dengan kemerdekaan dan kesa-

maan tiap warga) oleh Pancasila, dasar hidup bangsa. Apakah – menurut pemikiran Arah Dasar – proses membudaya dan memasyarakat tetap merupakan proses yang terbuka? Apakah Gereja yang adalah umat musafir itu berani ambil bagian dalam dinamika perubahan yang terbuka ke masa depan, yang tidak kita ketahui? Usaha untuk membangun kebersamaan tidak pernah "pas" dan tidak pernah selesai karena setiap hari muncul pendatang baru yang menuntut perubahan. Ataukah – menurut gaya pikir Arah Dasar – kita memelihara "persatuan bangsa Indonesia" yang "mengizinkan perbedaan peran, yang sering berkaitan dengan perbedaan pendidikan, kedudukan sosial" (Arah Dasar, 13). Sulitlah kalau program Gereja umat musafir diterjemahkan ke dalam pemikiran moral yang berawal dengan menggariskan suatu tatanan, entah tatanan hukum kodrat universal, entah tatanan nilai budaya setempat. Mungkin lebih konsisten, kalau moral umat musafir diterangkan sebagai **tindakan komunikatif**. Dasar moral adalah **usaha untuk melibatkan orang!** Tuntutan moral ialah: membangun hidup bersama, sehingga tak seorang pun disingkirkan dan setiap orang dapat hidup dengan merdeka. Dasar moral "tidak keras" dan tuntutan moral berubah-ubah; oleh sebab itu, dibutuhkan orang yang ikut "menafsirkan" hidup bersama kita, yang menemukan mereka yang disingkirkan dan menemukan jalan untuk memberikan tempat bagi mereka.

Dan satu pengamatan lagi. Arah Dasar yakin: moral umat musafir diarahkan oleh prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Kedua prinsip klasik moral sosial kini menjadi prinsip moralitas kristiani pada umumnya. Syukur kalau demikian! Oleh sebab itu mesti dipertanyakan, mengapa prinsip solidaritas ditempatkan pada jajaran kedua. Menurut asas solidaritas, kita manusia hanya dapat hidup dalam kebersamaan dan oleh karena itu kita bertanggung jawab membangun kebersamaan sehingga semua orang dapat hidup, sama seperti kita bertanggung jawab atas hidup kita pribadi. Prinsip solidaritas menyebut kewajiban dasar untuk membangun kebersamaan bagi semua orang. Dalam prinsip solidaritas, terungkap tekad praktis, untuk berpolitik guna membangun masyarakat; solidaritas (bukan hanya bela rasa dengan orang berkekurangan!!) menjadi kewajiban dasar umat yang diutus. Hanya demi solidaritas, masuk akal bahwa kita menyuarakan subsidiaritas. Sebab subsidiaritas bukan hanya "memberi tempat serasi bagi kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok, dan seluruh rakyat secara proporsional dan wajar" (Arah Dasar, 14). Siapa telah menentukan proporsi yang tepat??? Prinsip subsidiaritas menuntut dan sekaligus mengandalkan bahwa setiap orang ikut berpikir dan setiap anggota mengambil inisiatif untuk

membangun kebersamaan itu. Dari keanekaragaman sumbangan yang unik, kebersamaan kita akan mendapat wajah yang serasi; dan belum tentu tata nilai indah yang diwariskan akan bertahan dalam konstelasi baru! Maka eklesiologi persekutuan umat musafir mungkin lebih konsisten diterjemahkan ***dalam moral sebagai tindakan komunikatif***; moral komunikatif mencari pengarah dengan melibatkan penalaran dan inisiatif orang dan mencari ***kebijaksanaan dalam "Lebenswelt"*** masing-masing orang supaya memperkaya hidup bersama kita.

Menurut Arah Dasar, umat musafir bertekad "membentuk hidup keluarga, politik, dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat dan negara; mengabdikan diri dalam pendidikan, kesehatan, komunikasi massa, pelbagai karya sosial, dan amal di tengah rakyat" (Arah Dasar, 16). Bidang-bidang itulah yang pantas mendapat perhatian moral; sebab hidup keluarga, hidup politik, hidup ekonomi, dan hidup budaya merupakan bidang pengumpulan sosial dewasa ini dan menantang keterlibatan umat beriman; sedangkan pendidikan dan persekolahan, kesehatan dan komunikasi sosial mendapat perhatian Gereja Indonesia, sejak awal karya misi zaman modern di abad yang lalu. Untuk masing-masing bidang, Arah Dasar menyebut sejumlah tujuan; dan dalam tujuan-tujuan itu kita mudah mengenal kembali pokok-pokok tradisi kristiani perihal moral sosial dan pribadi. Apakah Arah Dasar dapat ***meng-"komunikasi"-kan pokok-pokok moral kristiani*** itu?

1. ***Keluarga*** mendapat tempat utama di antara bidang-bidang tanggung jawab moral, karena hidup masyarakat bertumpu pada hidup keluarga yang sehat (Arah Dasar, 17). Selanjutnya digambarkan hidup keluarga yang "sehat" menurut cita-cita personal yang dikembangkan oleh moral keluarga Katolik selama tujuh puluh tahun terakhir ini. Keluarga adalah kancha perjumpaan dalam kasih antara laki-laki dan perempuan, antara orang tua dan anak; ruang di mana bertumbuh kepribadian yang unik, di mana orang belajar berkomunikasi dan beriman; dan last not least: keluarga adalah gereja kecil. Arah Dasar mengharapkan agar hidup keluarga turun-temurun mewariskan tradisi-tradisi kemanusiaan dan kristiani; dan memang tidak sulit untuk membubuhi ketujuh tujuan dengan kutipan teks Konsili Vatikan II atau Himbauan Apostolik Familiaris Consortio.

Di Indonesia, hidup keluarga amat bervariasi, antara kekeluargaan desa di Jawa dan hidup marga di Sumatra Utara, antara hidup keluarga inti di perumahan pinggir kota metropolitan dan hidup keluarga di rumah panjang di Kalimantan; rangkaian pedoman untuk keluarga men-

cerminkan wujud hidup keluarga yang beraneka-ragam seperti itu. Namun membaca semuanya, orang bertanya: manakah pergumulan dan jerih payah keluarga dewasa ini, yang mau ditanggapi dengan pokok-pokok pengarahannya ini? Kesulitan orang muda di pinggiran kota untuk menemukan partner yang dipercaya? Kesulitan keluarga di daerah dengan anak-anaknya yang serba frustrasi? Krisis keluarga, karena suami dan istri (terpaksa) mencari nafkah dan hampir tidak pernah ketemu? Atau lain lagi? Pada umumnya, **moral mencari jalan keluar** dari situasi yang menjepit orang. Moral mau meringankan penderitaan, membebaskan orang yang menjadi kurban kepentingan orang lain. Maka pertanyaan pertama bagi moral keluarga ialah: manakah penderitaan keluarga dewasa ini? bagaimana umat musafir tersangkut dan terlibat, sehingga dapat ikut meringankannya?

2. Arah Dasar "mendambakan **pembangunan politik** yang berperikemanusiaan" (Arah Dasar, 18) dan untuk itu menyebut delapan cita-cita politik mengenai negara hukum yang menghormati hak-hak asasi manusia. Dalam kedelapan butir itu bergemalah cita-cita katolisisme politik (yang mulai dari zaman Pater van Lith berpengaruh juga dalam kawasan dan negara Republik Indonesia); dalam butir-butir itu terungkap juga keyakinan politik Indonesia, bahwa berdasarkan nilai-nilai dasar yang disepakati dalam Pancasila mungkin kita membangun suatu negara kesatuan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun mungkin kita dapat belajar dari sejarah umat Katolik di Indonesia; belajar bukan saja, manakah cita-cita politik yang perlu kita junjung tinggi. Keterlibatan politik orang kristen Protestan dan orang Katolik di kawasan Indonesia berawal bukan dari cita-cita politik dan nilai-nilai dasar, melainkan dengan hasrat politik segelintir orang yang membaktikan hidup mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi semua, karena mereka sendiri mau bebas dari penindasan. Keterlibatan politik orang Katolik di Indonesia tidak mulai dari ajaran sosial Gereja abad yang lalu, melainkan dari gerakan kaum muda tahun '28 dan '65. Dalam gerakan itu, kebetulan atau tidak, terlibat juga sejumlah orang Katolik. Mereka merumuskan cita-cita politik, yang – sekurang-kurangnya di masa kolonial – tidak disyahkan oleh Gereja sebagai nilai-nilai dasar kristiani. Namun sejak itu juga, tanggung jawab politik Gereja Katolik bagaikan umat musafir lebih mengandalkan tokoh-tokoh daripada nilai-nilai. Para tokoh sanggup membaktikan diri dan dengan demikian menulis cita-cita politik untuk sekarang ini. Arah keterlibatan politik ditunjukkan oleh pejuang-pejuang. **Siapakah "tokoh-tokoh"** yang

untuk masa ini menulis cita-cita politik yang berlaku dalam umat musafir itu?

3. Arah Dasar "meneruskan tekad ikut mendukung **usaha pendidikan** dengan visi bersama yang luas" (Arah Dasar, 22). Di bawah lingkup visi yang luas, ada ruang untuk banyak macam cita-cita: untuk cita-cita pendidikan bagi kaum tertindas dan untuk cita-cita pedagogik perkembangan liberal; untuk kepentingan pendidikan nasional dan hak-hak atas pendidikan swasta (sekolah katolik); untuk pendidikan humanis oleh pendidik unggul dan untuk pendidikan politik. Semuanya itu tentu saja mencerminkan cita-cita sekolah katolik, sebagaimana dikembangkan di kawasan Indonesia, sejak suster-suster (Ursulin) dan bruder-bruder (S. Aloysius) membuka sekolah-sekolah mereka di Jalan Pos, Batavia dan di Jalan Sultan Agung, Bandung.

Pendidikan oleh Gereja menjamin kualitas pendidikan; namun mulai dengan van Lith di Muntilan, pendidikan oleh Gereja sekaligus juga menjadi empowerment – mula-mula untuk berpartisipasi dalam gerakan nasional kemerdekaan, di kemudian hari untuk memperjuangkan hidup bersama yang demokratis-sejahtera. Pendidikan menjadi dukungan praktis untuk orang yang dipinggirkan, supaya mereka menjadi mampu untuk merebut tempat mereka. Kini ada orang yang meragukan, apakah Gereja (di Indonesia) masih dapat menetapkan dan mempertahankan standar pendidikan bermutu; namun kalau ingin memberikan pengarahan moral di bidang pendidikan, mesti menjadi jelas dulu, ***gerak manakah*** dalam hidup kaum muda dewasa ini, ***mesti mendapat empowerment*** oleh usaha Gereja itu?

4. Sama seperti untuk "pendidikan", demikian pula untuk "kesehatan". Arah Dasar merumuskan dengan tepat dan ringkas cita-cita yang diwujudkan oleh pelayanan kesehatan katolik: usaha kesehatan profesional, yang membuat orang sakit tidak tergantung melainkan mandiri, yang hendaknya tersedia bagi semua (merata), dan yang ditanggung secara mandiri dan dalam solidaritas: pelayanan kesehatan yang menghormati pribadi manusia dan menyayangi hidup (Arah Dasar, 23 – dan bandingkanlah surat Konperensi Waligereja Indonesia "Sayangi-lah kehidupan").

Namun lain dunia dari pelayanan kesehatan yang diberikan "gratis", bagaikan rahmat demi amal-kasih seorang samaritan terhadap orang tergeledah di pinggir jalan; lain dunia dari jasa pelayanan kesehatan, yang ditawarkan atas dasar balas-jasa, di mana kesehatan dipandang

bagaikan hak setiap warga negara yang gantinya harus dibayar mahal. Pelayanan kesehatan katolik mulai dengan Caritas para suster amal-kasih. Kini, cita-cita luhur pelayanan kesehatan ternyata harus diperjuangkan, entah melawan kepentingan semua yang lebih senang menjual obat dari pada membantu orang untuk menjadi sembuh sendiri; entah melawan dunia (ilmu) kedokteran yang bersaing dalam mengembangkan pengetahuan dan teknik pengobatan, dan tidak bersaing dalam upaya pemerataan; entah melawan ongkos pelayanan yang meluncur setinggi langit atau melawan praktik pengobatan misterius yang membodohkan rakyat! Daftar tendensi lawan mungkin panjang; bagaimanapun jua, moral kesehatan mesti dirumuskan sebagai **moral alternatif**, sebagai usaha yang lain daripada yang lain, untuk melawan tendensi yang membahayakan kesehatan.

Kalau ingin memberi pengarahan untuk moral komunikatif, kita harus merumuskan moral dengan cara "**problem-posing**", bukan dengan cara "**problem-solving**". Tradisi nilai-nilai kristiani mengenalkan cara-cara masa lampau yang terbukti mengembangkan hidup manusia – dulu. Namun cita-cita itu biasanya tidak membuat orang bergairah; pengarahan untuk moral komunikatif terutama harus menyebutkan, manakah masalah yang mesti kita tangani, supaya hidup manusia di bumi ini tidak musnah. Tantangan hidup-mati semacam itu dapat melibatkan dan mempersatukan orang. Pengarahan moral harus menyebutkan:

- Manakah **penderitaan manusia** yang harus diatasi?
Penderitaan orang menetapkan kewajiban moral.
- Siapakah orang yang **punya interese**, supaya keadaan yang tidak adil **berubah**?
Inisiatif ada pada orang yang berkepentingan; hanya kepentingan menghasilkan perbuatan.
- Siapakah orang yang **dipinggirkan**?
Orang marginal mulai membangun masyarakat, pada saat mereka berdaya; mereka membawa kebijaksanaan yang ternyata dapat mempertahankan hidup.
- Siapakah orang yang **melawan**?
Perlawanan menuntut jerih-payah moral, sampai semua saja yang tersangkut dimenangkan demi kepentingan semua.

Undangan bagi Rekan-Rekan Ilmu

Keempat pertanyaan itu tidak mungkin dijawab oleh para pakar teologi moral – apriori dan atas dasar prinsip-prinsip mereka; untuk itu, para ahli teologi moral harus mengundang mereka yang biasanya mengadakan penelitian empirik di bidang psikologi sosial dan sosiologi politik, di bidang kedokteran dan ilmu perawatan, di bidang psikologi agama dan lain seperti itu. Dan jangan diharapkan bahwa sosiologi ataupun kedokteran menyediakan pertanyaan jadi yang tinggal dijawab oleh teologi moral. Kalau tidak bertanya, teologi moral tidak mendapat jawaban. Tergantunglah dari pertanyaan para ahli moral, manakah jawaban yang diperoleh dari ilmu sosial; tergantunglah dari jawaban yang diperoleh, bagaimana teologi moral merumuskan masalahnya dan mencari pengarahannya. Tergantunglah dari visi dan petunjuk para ahli moral, apakah pengarahannya kena di hati dan menggerakkan usaha. Hasil mesti diteliti kembali oleh mereka yang biasanya mengadakan penelitian empirik. Dapatkah teologi moral mengundang forum penelitian di mana para ahli teologi dan mereka yang biasanya mengadakan penelitian empirik membicarakan:

- Manakah *interesse orang muda* yakni generasi yang akan datang untuk membuat perubahan?
- Manakah *kebijaksanaan perempuan* (kelompok yang dipinggirkan) dalam mempertahankan hidup?

Bidang-bidang hidup "Keluarga" dan "Politik", "Pendidikan" atau "Kesehatan" pantas mendapat perhatian umat musafir, yang menegaskan dalam proses kemasyarakatan menegaskan arah. Umpamanya:

Perihal "Keluarga": Keluarga pantas mendapat perhatian istimewa, antara lain karena dalam keluarga, orang belajar keutamaan-keutamaan sosial yang paling dasar. Pada umumnya moral keluarga mulai dengan prinsip: keluarga merupakan kancha tempat laki-laki dan perempuan secara sepadan saling membangun kasih. Keluarga sudah selalu "diandaikan", sebagai panggung untuk main partnership, sebagai wadah untuk berdebat dan untuk saling mengasihi, sebagai kerangka untuk berpikir bersama dan sebagai lingkup rasa untuk menjadi sehati-sejiwa. Padahal, keluarga baru terjadi kalau laki-laki dan perempuan menjadi sehati-sepikir dan seperasaan, dan kalau mereka berhasil membangun rumah-tangga karena belajar saling menampung. Keluarga adalah peristiwa, yang bisa "jadi" dan mungkin "gagal". Maka moral keluarga tidak boleh mulai dengan metafisik perkawinan (biarpun metafisik itu

diambil dari surat Paulus kepada umat di Efesus) melainkan dengan bertanya: apa yang mendorong orang untuk mau menempuh jalan menjadi terpadu itu? Bukan dalam teori melainkan dalam hidup buruh muda yang mencari suami atau dalam usaha ayah dan suami untuk "menghidupi" keluarga, waktu bayi pertama lahir dan waktu anak-anaknya sekolah di SMU? Sebaiknya, moral mengenai kesatuan perkawinan mulai dengan membicarakan bagaimana pengaruh lingkungan dan bagaimana kepribadian orang dewasa ini mempersulit dan menuntut serta membantu laki-laki dan perempuan untuk menjadi terpadu. Apakah memang "partnership" adalah jalan dan praksis supaya dewasa ini orang menjadi terpadu? Semoga forum pembicaraan diikuti oleh mereka yang biasa *meneliti psikologi sosial* supaya kita menemukan: manakah keutamaan sosial untuk dewasa ini?

Pengarahan umat musafir dalam hal "politik" bernasib serupa dengan pengarahan dalam hal "keluarga". Seakan-akan negara Pancasila kita ini sudah selalu diandaikan bagaikan barang jadi, tak pernah berubah, sebagai wadah di mana setiap orang dengan aman dan teratur dapat bermasyarakat dan berbangsa! Kalau republik lahir dari inisiatif pemuda untuk membela hidup merdeka, perlu ada hasrat serupa untuk mempertahankan negara sebagai satuan politik. Maka di samping usaha advokasi untuk membela Hak Azasi Manusia, moral politik harus menggali kesanggupan dan hasrat mereka, yang ingin membangun negara ini. Siapakah aktivis politik, di medan nasional, dan lebih lagi di lingkup lokal? Mengapa mereka mau berjerih-payah untuk melibatkan makin banyak tetangga dan sesama warga demi membangun kebersamaan? Manakah akal yang mereka temukan untuk mengatasi kelesuan, kekerasan, kecurangan yang menghambat? Apakah dalam lingkungan teologi moral kita punya ruang untuk diskurs di mana terutama mereka yang biasanya menjalankan *penelitian sosio-politik*, sempat bicara dan berdebat jujur? Kalau aspirasi dan perjuangan aktivis (muda) disuarakan, orang melihat arah nyata hidup berbangsa dan bernegara; kita mengenal aspirasi yang sebenarnya mempersatukan negara kesatuan ini.

"Pendidikan" adalah usaha pemberdayaan, supaya keyakinan-keyakinan yang terpendam, keinginan dan tekad hati yang terbelenggu, serta rasa dan perasaan yang sampai kini diingkari, dibebaskan dan digerakkan dan dengan demikian memperkaya kebersamaan kita. Pokoknya: Supaya kelompok yang dipinggirkan, ditempatkan ke dalam tanggung jawab dan menyumbang kebijaksanaan hidupnya! Dengan pendidikan yang mereka peroleh – umpamanya – orang muda yang

kini terpaksa menunggu di depan hidup bersama, menjadi berdaya untuk merebut peran mereka! Demikian pula, pantas diangkat segala kebijaksanaan dari "Lebenswelt" kaum perempuan, menjadi koreksi bagi cara hidup bersama yang di-"kuasa"-i oleh gaya dan kepentingan laki-laki. Boleh diharapkan keterlibatan mereka, kalau diperjuangkan cita-cita mereka! Moral yang memperjuangkan nilai-nilai tradisi, berpikir pesimis; seakan-akan kemerosotan masa kini harus didongkrak dengan nilai luhur masa lampau. Apakah pessimisme moral dapat ditolong, kalau mereka yang mengadakan *penelitian empirik sosio-budaya* memperlihatkan siapakah agen perubahan dalam lingkungan kita, manakah cita-cita dari mereka yang ingin membawa perubahan dan manakah kebijaksanaan mereka yang bertahan?

CATATAN

- 1) Joannes Paulus II, Ensiklik "Veritatis splendor", no. 112.
- 2) Bdk. Sidang Paripurna Federasi Konperensi-konperensi para Uskup Asia (FABC), 17-27 Juli 1990 di Lembang, Bandung, *Spektrum XIX* (1991), no. 2, 3 dan 4; kutipan-kutipan dari Pernyataan Penutupan (*ibid.* hlm. 81 dst.) atau (teks inggris) Final Statement (*ibid.* 117).
- 3) Bdk. *ibid.* 124.
- 4) Bdk. *ibid.* 125.
- 5) *Ibid.* 126 dan 127.
- 6) *Ibid.* 130.
- 7) Bdk. rumus-rumus dari Sidang Paripurna FABC V di Bandung, *ibid.* 131 dan 132.
- 8) Bdk. *ibid.* hlm. 132.
- 9) Umat Katolik Melibatkan Diri, no 134.
- 10) Theses on interreligious dialogue. An essay in pastoral theological reflection, *FABC Papers* no. 48.
- 11) Dasar dari dialog adalah suatu "complementarity which promotes mutual enrichment and leads to fulfillment in the future" (*FABC Papers* no. 48, hlm. 5).
- 12) Bdk. *ibid.* hlm. 10, Thesis 4.